



**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA
INSTANSI BPPSDMP**

Renaldi
Universitas Pamulang

Abstract

Government Accounting Standards are a guide for central and local governments in presenting financial reports. Accounting standards are needed so that financial reports produced by the central and local governments can be compared and understood by report presenters with report readers. The financial report is the responsibility of the central / regional government in realizing the budget that has been given and used appropriately. The object of this research is the Agricultural Extension and Human Resources Development Agency (BPPSDMP). This study aims to describe the analysis of the presentation of the Budget Realization Report at the BPPSDMP Agency. The analytical method used is descriptive analysis method where the research is carried out by collecting data, presenting data, and analyzing the collected data and making conclusions in accordance with the actual situation. The results showed that the Agency for Agricultural Extension and Human Resources Development (BPPSDMP) had presented information in the form of financial reports and all transactions carried out by BPPSDMP agencies and reported to the responsible party.

Keywords: Analysis, presentation, and Budget Realization Report.

Abstrak

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan panduan bagi Pemerintah pusat maupun daerah dalam menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah pusat dan daerah dapat diperbandingkan dan dipahami oleh para penyaji laporan dengan pembaca laporan. Laporan keuangan merupakan pertanggung jawaban Pemerintah pusat/daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah diberikan dan digunakan dengan semestinya. Objek penelitian ini adalah Instansi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Instansi BPPSDMP. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data, menyajikan data, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan Instansi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) telah menyajikan informasi berupa laporan keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Instansi BPPSDMP dan dilaporkan pada pihak yang bertanggung jawab.

Kata kunci: analisis, penyajian, dan Laporan Realisasi Anggaran.



PENDAHULUAN

Pada era saat ini, pemerintah semakin berlomba-lomba untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal itu biasa disebut dengan nama *good governance*. Tuntutan dari masyarakat semakin mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Penerapan *good governance* ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, pemerintah, maupun pihak sektor swasta (Arifah, 2019).

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan *good governance* ini yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara maka APBN selalu menjadi tolak ukur akan kemajuan bangsa Indonesia sehingga perlu adanya bentuk laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBN tersebut yang disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Pertumbuhan pembangunan baik pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur merupakan target dari APBN itu sendiri, sehingga Pemerintah harus bisa menentukan kebijakan di bidang anggaran belanja dengan tepat agar stabilitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tetap dapat di pertahankan.

Setiap negara memiliki standar akuntansi berbeda-beda yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan (Arifah, 2019). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi dari laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja Pemerintah. Dimana PP No. 71 tahun 2010 mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial yang berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaksanaan pelaporan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD (Arifah, 2019). Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan



keuangan sehingga akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta *good governance* dapat tercapai (Irawan, 2016).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, baik pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas (Nordian, 2010).

Salah satu unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan berbagai peraturan yang sudah ditetapkan, tentunya pemerintah menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian dan pengelolaan laporan keuangan Pemerintah. Tetapi pada kenyataannya masih banyak Pemerintah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPK juga masih banyak menemukan penyimpangan-penyimpangan di dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah dimana peristiwa tersebut menimbulkan adanya dugaan kekurangsesuaian penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah dengan standar yang berlaku. Hal ini lah yang membuat perlu dilakukannya sebuah analisis dari penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Bertitik tolak pada masalah tersebut, dan mengingat pentingnya suatu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk pengambilan keputusan maka penting untuk melakukan tinjauan lebih lanjut yang dituangkan dalam laporan Tugas Akhir ini yang berjudul : “analisis penyajian laporan realisasi anggaran pada instansi bppsdp” dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Laporan Realisasi Anggaran pada Instansi BPPSDMP.



TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Abdul, 2014:3).

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut :

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Substansi mengunggul bentuk formal
- e. Prinsip Periodisitas
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Pengungkapan Lengkap
- h. Penyajian Wajar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember) yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan undang-undang.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut SAP adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;



3. Laporan Arus Kas;
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.

SAP memiliki beberapa basis penerapan :

1. SAP berbasis kas
2. SAP berbasis kas menuju akrual
3. SAP berbasis Akrual

Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA)

SAIBA merupakan aplikasi akuntansi pemerintah pusat yang dibuat dalam rangka menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual. Peranan aplikasi di sektor pemerintahan tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan sektor swasta. Instansi diharapkan bekerja dan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu instansi juga harus bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, dimana anggaran tersebut sudah seharusnya terserap untuk kegiatan operasionalnya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pelaporan laporan keuangan yang menunjukkan berapa besarnya penyerapan anggaran yang digunakan beserta penjelasannya.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang Realisasi dan Anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar (Harry Al Makka, 2015).

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). BPPSDMP ini difokuskan pada pengembangan SDM dan kelembagaan petani dengan tujuan untuk mewujudkan SDM Pertanian yang kreatif, inovatif, dan berwawasan global. BPPSDMP mempunyai tugas untuk melaksanakan penyuluhan



dan pengembangan sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain tugas, BPPSDMP mempunyai fungsi untuk penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, yaitu Peneliti melakukan observasi selama satu bulan di Kementerian Pertanian dan metode Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil data dalam bentuk laporan keuangan.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu peneliti menggunakan data-data yang diperoleh dari buku-buku dan referensi lainnya serta peneliti melakukan observasi untuk memperoleh data dokumentasi berupa laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan Model Miles & Huberman. Dimana Model ini sejatinya merupakan metode analisis data kualitatif yang selama proses pengumpulan datanya mencakup aktivitas reduksi Data (*Data Reduction*), penyajian Data (*Data Display*) dan penarikan Kesimpulan (*Data Display*)

HASIL

Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar 130,89 persen dibandingkan 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan kembali belanja barang dan belanja modal tahun anggaran yang lalu.

Tabel 4.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Realisasi 30 Juni 2019	Realisasi 30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	186.741.890	478.412	38.933,70
Pendapatan Jasa	-	41.850.492	(100,00)
Pendapatan Pendidikan	-	-	-
Pendapatan Iuran dan Denda	-	6.021.020	-
Pendapatan Lain-lain	1.542.150.473	700.430.545	120,17
Jumlah	1.728.892.363	748.780.469	130,89

Sumber : Laporan Keuangan BPPSDMP Semester 1, Diolah penulis 2020.



Belanja

Realisasi Belanja pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 97.510.773.480,- atau 28,38% dari anggaran belanja yang sebesar Rp. 343.589.368.000,-. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Berikut tabel Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 Juni 2019 beserta dengan persentase realisasinya:

Tabel 4.2

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2019

Uraian	30 Juni 2019		%
	Anggaran (Ribu)	Realisasi (Ribu)	
Belanja Pegawai	20.915.396	10.366.784	49,57
Belanja Barang	316.714.246	86.861.707	27,43
Belanja Modal	5.959.726	2.361.376	39,62
Total Belanja Kotor	343.589.368	99.589.867	28,99
Pengembalian Belanja		2.079.093	
Total Belanja	343.589.368	97.510.773	28,38

Sumber: Laporan Keuangan BPPSDMP Semester 1, Diolah penulis 2020.

Sedangkan realisasi serapan anggaran per kegiatan utama yang serapan anggarannya masih dibawah rata-rata capaian adalah kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yang baru mencapai Rp. 9.362.472.874,- atau sebesar 17,43% dari pagu anggaran senilai Rp. 53.708.151.000,-. Berikut adalah realiasi belanja berdasarkan kegiatan sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Rincian Realisasi Belanja 30 Juni 2019

Uraian	PAGU	Realisasi SP2D	% Realisasi
1810 Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	53.708.151.000	9.362.472.874	17,43
1812 Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	40.501.578.000	9.659.083.782	23,85
1813 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	124.042.973.000	40.550.210.188	32,69
5892 Pendidikan Menengah	125.336.666.000	37.939.006.636	30,27
TOTAL	343.589.368.000	97.510.773.480	28,38

Sumber : Laporan Keuangan BPPSDMP Semester 1, Diolah penulis 2020.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negara Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.366.764.289,- dan Rp. 10.040.684.125,-. Realisasi belanja pegawai 30 Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar 3.25 persen dari 30 Juni 2018 hal ini disebabkan banyaknya pegawai yang pensiun per 30 Juni 2019.

Belanja Barang

Realisasi belanja barang 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 84.782.633.095,- dan Rp. 48.345.905.492,-. Realisasi belanja barang 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 4.06% dari realisasi belanja barang 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan karena sampai dengan 30 Juni 2019 belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat belum terealisasi.

Realisasi belanja barang bantuan pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sampai dengan 30 Juni 2019 sebesar Rp. 2.005.764.500,- terdiri dari bantuan pemerintah dalam bentuk barang senilai Rp. 2.005.764.500,-.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal 30 Juni 2019 dan 30



Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.361.376.096,- dan Rp, 1.116.964.500,-. Realisasi belanja modal 30 Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar 111.41% dibandingkan realisasi Juni 2018 dikarenakan kenaikan alokasi pagu anggaran belanja modal per 30 Juni 2019 sebesar 151,42 %.

Pembahasan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Penyajian adalah suatu proses dan cara untuk menyediakan menyampaikan suatu laporan. Instansi BPPSDMP menyajikan laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran terhadap seluruh kegiatan ataupun transaksi yang telah dilakukan. Dimana laporan keuangan mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah yang menunjukkan Ketaatan terhadap APBN. Laporan Realisasi Anggaran juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah dalam satu periode pelaporan, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Instansi BPPSDMP berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Semester I T.A 2018 sampai dengan T.A 2019 dengan hasil analisis varians belanja Semester I T.A 2018 – T.A 2019 menunjukkan kinerja yang sama dengan Laporan Realisasi Anggaran Semester I T.A 2018, dengan realisasi yaitu semester I T.A 2018 sebesar Rp. 59.503.554.117,- atau 28% dari total APBN, dan untuk semester I T.A 2019 Rp. 97.498.773.480,- atau 28% dari total APBN.

Hasil analisis pertumbuhan belanja untuk tahun anggaran 2019 Semester I adalah sebesar Rp. 38.007.219.363,- atau 63,87% dari tahun anggaran 2018 Semester I. Belanja yang paling mempengaruhi kenaikan pertumbuhan jumlah belanja tahun anggaran 2019 Semester I adalah Belanja Barang sebesar Rp. 36.436.727.603,- atau 75,37 % dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.244.411.596,- atau 111,41 %. Dari hasil analisis maka dapat diketahui Instansi BPPSDMP dalam melakukan aktivitas belanjanya, tidak hanya memfokuskan belanja pada belanja barang saja tetapi juga belanja modal dan belanja pegawai . Hanya saja, perbedaan dari ketiga aktivitas belanja tersebut adalah aktivitas belanja barang jauh lebih besar dari pada aktivitas belanja modal dan belanja pegawai.

Hasil analisis pertumbuhan Pendapatan untuk tahun anggaran 2019 Semester I adalah sebesar Rp. 980.111.894,- atau 130,89% dari tahun anggaran 2018 Semester I. Belanja yang



paling mempengaruhi kenaikan pertumbuhan jumlah belanja tahun anggaran 2019 Semester I adalah Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp. 841.719.928,- atau 120,17 % dan Pendapatan dari Pengelolaan BMN sebesar Rp. 186.263.478,- atau 38.933,70 %. Dari hasil analisis maka dapat diketahui Instansi BPPSDMP dalam melakukan Meningkatkan Pendapatannya, tidak hanya memfokuskan Pendapatannya pada Pendapatan dari Pengelolaan BMN saja tetapi juga pada Pendapatan Lain-Lain. Hanya saja, perbedaan dari kedua Peningkatan Pendapatan tersebut adalah Peningkatan Pendapatan dari Pengelolaan BMN jauh lebih besar dari pada Peningkatan Pendapatan Lain-Lain.

Berdasarkan analisis Laporan Realisasi Anggaran T.A 2018 Semester I sampai T.A 2019 Semester I masing-masing diketahui bahwa T.A 2018 Semester I realisasi belanja sebesar 23,40% dan T.A 2019 Semester I realisasi belanja sebesar 28,38 % dari yang dianggarkan. Secara umum seluruh komponen belanja, baik belanja barang maupun belanja pegawai dan belanja modal menunjukkan kinerja yang baik, dimana terdapat efisiensi yang memadai terlebih lagi untuk tahun anggaran 2018 semester I. Kemudian untuk T.A 2018 semester I realisasi pendapatan sebesar 573,56% dan T.A 2019 semester I realisasi pendapatan sebesar 613,08% dari yang ditargetkan. Secara umum seluruh komponen Pendapatan, baik Pendapatan Pengelolaan dari BMN maupun Pendapatan Lain-Lain menunjukkan kinerja yang baik, dimana terdapat efisiensi yang memadai terlebih lagi untuk tahun anggaran 2018 semester I.

Setelah dilakukannya analisis penyajian laporan realisasi anggaran pada Instansi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dapat diketahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran pada Instansi BPPSDMP telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini karena Instansi tersebut sudah menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) dalam proses penyusunan LRA nya, dimana aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk digunakan di setiap Kementerian Negara. Dengan digunakannya aplikasi tersebut dapat diketahui juga bahwa Instansi BPPSDMP menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual sehingga LRA dari Instansi BPPSDMP pengungkapannya sudah lebih komperhensif, yang artinya informasi yang diungkapkan dalam LRA Instansi BPPSDMP sudah jelas, lengkap, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintahan.



KESIMPULAN

1. Laporan realisasi anggaran Instansi BPPSDMP telah menyajikan informasi berupa laporan keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Instansi BPPSDMP dan dilaporkan pada pihak yang bertanggung jawab.
2. Laporan Realisasi Anggaran pada Instansi BPPSDMP sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
3. Laporan Realisasi Anggaran pada Instansi BPPSDMP telah mencapai target pendapatan pada T.A 2018/2019 Semester I.
4. Secara umum seluruh komponen belanja dan pendapatan telah menunjukkan kinerja yang baik, dimana terdapat efisiensi yang memadai terlebih lagi untuk tahun anggaran 2018 semester I.

SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Instansi BPPSDMP agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan belanja barang maupun belanja modal secara khusus dan secara umum. Dengan kinerja yang baik maka efektifitas, produktifitas dan efisiensi belanja juga akan semakin baik.
2. Perlu adanya perhatian lebih dari Instansi BPPSDMP terhadap belanja modal, karena dengan belanja modal yang digunakan untuk aset-aset tetap akan berguna dalam jangka panjang dan memberikan manfaat pada masa yang akan datang.
3. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan laporan realisasi anggaran.
4. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya, agar dapat meneliti kinerja secara lebih rinci terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sehingga akan selalu ada perubahan kearah yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Antong, Duriani, Milda Masri. (2014). Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam Menilai Kinerja Keuangan Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, Vol 1, No 1.
- Eduard.J.G Santie, J.J Tinangon, L.M Mawikere. (2015). Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Hal. 852-862.
- Grace, Liando. (2016). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA*, Hal.1473-1484.
- Hakim, D.R. et al. (2020). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Ifa Detri. (2014). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobongan). *Jurnal EMBA*, Hal. 1-20.
- Irawan, M. (2016). Penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan permendagri nomor 64 tahun 2013 (Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*. ISSN: 2337-5663. Volume: 4, Nomor: 2.
- Makka, Harry. (2015). Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, Hal. 324-333.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muindro, S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik (Organisasi Non Laba)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nordiawan, D., dan Hertianti A. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nunuy, N. (2009). *Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
- Ramlah Basri. (2012). Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Hal. 202-212.
- Santie, E. J. G., Jantje, J. T., dan Lidia, M. M. (2015). *Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.2 Juni 2015, Hal. 852862.
- Tita, Maulida. (2012). Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan). *Jurnal EMBA*, Hal. 1-24.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Yuniarti, Arifah. (2019). *Analisis Penerapan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.